

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal-hal yang dapat disimpulkan dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Kronologis pelaksanaan pemindahan letak Kantor Pemerintahan dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke wilayah Kecamatan Kototangah yaitu berawal dari gempa pada tahun 2009 yang merusak sebagian besar Perkantoran Pemerintah Kota Padang sehingga untuk menjaga ketertiban administrasi Kota Padang, Pusat Pemerintahan Kota Padang perlu dipindahkan ke wilayah yang lebih aman. Pelaksanaan pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang diawali dengan pengajuan surat oleh Walikota Padang ke Menteri Dalam Negeri melalui DPRD Kota Padang dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat terkait rencana pemindahan. Dibentuknya sebuah panitia khusus bertujuan untuk menilai lokasi letak Pusat Pemerintahan Kota Padang yang baru, terpilihlah Kecamatan Kototangah tepatnya di lokasi Terminal Aie pacah. Pemindahan dilakukan dalam 3 proses yaitu perencanaan, pra pelaksanaan, dan pelaksanaan. Sampai tahun 2014 ini, pembangunan baru sampai pada bangunan utama, sedangkan dalam market perencanaan akan dibangun dalam 3 bagian.
2. Status kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta yaitu PT. FML yang memiliki Hak Guna Bangunan selama 30 tahun dari tahun 2003 sampai tahun 2033, diakhiri dengan dilaksanakannya pemindahan Pusat

Perkantoran Pemerintah Kota Padang. Walaupun telah dilakukan sesuai prosedur, namun pihak PT. FML merasa tindakan pemerintah telah melanggar Perjanjian Nomor 25 tahun 2003 mengenai pembangunan Terminal Aie Pacah. Pt. FML akan menyetujui penyerahan kawasan tersebut jika pemerintah menyetujui penggantian kerugian pada PT. FML sebesar Nilai Investasi Terminal Aie Pacah yaitu sebesar Rp 25 Miliar.

3. Mengenai status ganti rugi hak-hak pihak ketiga atas dilaksanakannya pemindahan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang, PT FML telah mengganti rugi kepada para penyewa 190 ruko dengan cara menyicil, namun 11 penyewa tidak mau menerima ganti rugi tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Mengenai pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang yang sekarang telah berdiri di kawasan Kecamatan Kototangah, pemerintah sebaiknya memperbanyak sarana transportasi umum menuju kawasan pusat pemerintahan agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah jika berurusan ke Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Padang.
2. Sebaiknya pemerintah Kota Padang sesegera mungkin memindahkan seluruh kantor-kantor pemerintahan yang sekarang masih tersebar di seluruh penjuru kota Padang ke lokasi pusat pemerintahan sekarang untuk tertib administrasi dan koordinasi serta mempermudah masyarakat dalam berurusan.

3. Semenjak karya tulis ini dibuat, fasilitas terminal baik terminal angkutan umum maupun terminal angkutan barang masih sebatas penentuan lokasi. Sebaiknya pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas tersebut agar tidak terjadi lagi kemacetan yang cukup parah di beberapa lokasi di kota padang yang sekarang menjadi “terminal illegal”. Dengan dibangunnya terminal maka akan mengurangi kemacetan yang terjadi di beberapa lokasi tersebut.

4. Mengenai status kerugian yang diderita pihak-pihak ketiga agar pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut, sebab ketidak pastian ini telah merugikan pihak ketiga, dan kerugian tersebut diawali oleh tindakan pemerintah yang memindahkan Pusat Pemerintahan ke wilayah Terminal Aie Pacah.

